

UPAYA INGGRIS DALAM MENANGANI IMIGRAN UNI EROPA PADA MASA CAMERON TAHUN 2014-2016

Achmad Faisal¹
NIM. 1102045176

Abstract

The large EU migration flows in the UK caused many problems such as in the economic, social, and security sector. This research uses qualitative research methods, the type of research used is explanative descriptive type, the data presented are secondary data obtained through literature review and literature such as books, internet sites and others. Data analysis technique used is qualitative analysis. Theory or concept used in this research are the concept of immigration, and the concept of negotiation. The result of an agreement on EU regulations in UK's renegotiation with EU at the European Union Summit on February 18-19 2016 from UK's effort in EU Immigrant handling is a change that limits welfare benefits for 4 years, limits the export of child benefits, and a new mechanism in the process of deporting EU Immigrants. Special Status of the UK in dealing with EU immigrants related to restrictions on payment of welfare benefits and child benefit for 7 years. The Special Status will be created into laws that reform laws secondary EU immigration after viewing the results of the referendum on UK membership in the EU. The results of the referendum said positive Britain was out from EU membership so the law does not so implemented.

Keyword : *European Union Immigrants, United Kingdom, Renegotiation*

Pendahuluan

Terbentuknya pasar tenaga kerja Eropa dalam Perjanjian Maastricht tahun 1993 menciptakan lalu lintas pasar tenaga kerja bebas di wilayah Uni Eropa yang beranggotakan 13 negara yaitu Inggris, Jerman, Perancis, Luksemburg, Italia, Belanda, Belgia, Luksemburg, Denmark, Irlandia, Yunani, Spanyol, dan Portugal, Austria, Finlandia, dan Swedia. Tahun 2004 UE memperluas keanggotaannya atas dasar keterbukaan secara ekonomi yang ditandai dengan masuknya negara-negara dari Eropa Timur yaitu Polandia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Slovakia, Slovenia, Estonia, Republik Ceko, Malta, dan Siprus. Bergabungnya Rumania dan Bulgaria di tahun 2007, dan terakhir masuknya Kroasia di tahun 2013 (Sutarjo Adisusilo J.R : 2006 : 96).

Dasar hukum dari prinsip pergerakan bebas orang berdasarkan Perjanjian Maastricht tahun 1993 diatur di dalam pasal 8 yaitu 1. Kewarganegaraan Uni Eropa dengan ini dibentuk. Setiap orang yang menyandang kewarganegaraan suatu Negara Anggota wajib menjadi warga negara Perhimpunan. 2. Warga Uni Eropa akan menikmati hak yang diberikan oleh Traktat ini dan harus tunduk pada kewajiban yang diterapkan olehnya. Dalam perkembangannya menjadi Perjanjian Lisbon tahun 2009 yang berisi hak

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : iroyama.faitoshi@yahoo.co.id

pergerakan bebas kerja yang telah di konsolidasi tertera di dalam pasal 45 poin pokok yaitu 1. Kebebasan bergerak bagi pekerja akan dijamin dalam perhimpunan. 2. Kebebasan bergerak seperti itu memerlukan penghapusan diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan antara pekerja dari negara anggota sehubungan dengan pekerjaan, upah, dan kondisi kerja lainnya, dan pekerjaan. 3. Hal ini akan memerlukan hak, tunduk pada batasan yang dibenarkan atas dasar kebijakan publik keamanan atau kesehatan masyarakat. 4. Ketentuan Pasal ini tidak berlaku untuk pekerjaan di layanan publik (<http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-the-functioning-of-the-european-union-and-comments/part-3-union-policies-and-internal-actions/title-iv-free-movement-of-persons-services-and-capital/chapter-1-workers/187-article-45.html>).

Setelah di perlakukannya perluasan keanggotaan dan membuka akses pasar tenaga kerja dari Eropa Timur, dengan cepatnya melakukan imigrasi. Di tahun 2014 menurut *European Commission*, ada 5 negara anggota UE dengan jumlah pekerja UE tertinggi secara berurutan yaitu Jerman, Inggris, Spanyol, Italia, dan Perancis. Meskipun Jerman menempati posisi terbanyak didatangi para pekerja Imigran UE. Tetapi, di Inggris menyediakan kemudahan akses tunjangan kesejahteraan kepada Imigran UE yang di bayar rendah bermayoritas dari Eropa Timur, dengan paket pendapatan mereka yang sudah termasuk dari berbagai tunjangan yang didapatkan bisa sampai 80% daripada pembayaran pajak para pekerja ini setelah menyesuaikan perbedaan biaya hidup di negara-negara Eropa Timur. Hal ini yang menjadi faktor penarik yang cukup kuat untuk pekerja imigran Eropa Timur memilih Inggris sebagai tempat bekerja karena Inggris lebih mengangkat derajat pekerja imigran berpenghasilan rendah. Hal tersebut sudah termasuk kemudahan mendapatkan akses tunjangan anak dan pengangguran. Faktor terakhir adalah upah yang cenderung tinggi daripada negara UE lainnya berdasarkan perkiraan pendapatan disposisi rumah tangga rata-rata. Menurut *ONS UK* di tahun 2014 jumlah pekerja UE totalnya sekitar 1,7 juta pekerja imigran. Para pekerja UE yang melakukan imigrasi ke Inggris umumnya berstatus pendidikan tinggi. Biasanya, imigran yang berasal Eropa Barat mayoritas bekerja di sektor terampil, sedangkan imigran Eropa timur bekerja di sektor non terampil di Inggris.

Keberadaan imigran UE di Inggris memberikan dampak positif kepada Inggris karena Imigran terampil memiliki keterampilan dan pengalaman yang lebih banyak daripada pekerja Inggris sehingga imigran melengkapi ketenagakerjaan bersama para pekerja Inggris bukan menggantinya serta imigran juga membantu meningkatkan upah dan produktivitas untuk semua orang secara merata.

Dampak negatif juga terlihat dari fiskal Inggris, berdasarkan lembaga penelitian migrasi *Migration Watch UK*, pekerja UE non terampil yang masih lajang memberi dampak terhadap kontribusi pajak bersih yang berjumlah sekitar 1 £ lebih yang cenderung negatif ke saldo Inggris. Dengan bukti ini bahwa para pekerja non terampil menerima manfaat atau tunjangan kesejahteraan lebih banyak seperti kredit pajak, dan lainnya daripada membayar pajak. minggunya dan sebagainya. Imigran non terampil ini dibebani pembayar pajak Inggris 3500 £ per tahun. Pembayar pajak Inggris juga membebani biaya tunjangan anak untuk anak-anak Imigran UE di negara anggota lainnya sekitar 36 juta £ per tahun. Kemudian dampak negatif lainnya adalah permasalahan keamanan di Inggris. UKCA-ECR lembaga Inggris-UE tahun 2014 menotifikasikan sekitar 11.313 jumlah warga negara UE yang melakukan tindak kriminal di Inggris. Berdasarkan aspek sosialnya, Inggris mengalami kerugian dan penipuan melalui klaim tunjangan kesejahteraan palsu yang seharusnya di klaim oleh para imigran yang berhak dimanfaatkan oleh para jaringan kriminal asal Polandia untuk kepentingan pribadi.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Migrasi

Definisi Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lainnya melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik. Migrasi juga diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu wilayah (negara) ke wilayah (negara) yang disebut migrasi internasional.

1. Jenis-Jenis Migrasi antara lain :

- a. Migrasi Internasional adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Berdasarkan pergerakannya yaitu imigrasi merupakan masuknya penduduk ke suatu negara, sedangkan emigrasi adalah kebalikannya yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara.
- b. Migrasi Neto adalah selisih antara jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila migrasi yang masuk lebih besar daripada migrasi keluar disebut migrasi neto positif, sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk disebut migrasi neto negatif.
- c. Migrasi Internal adalah perpindahan penduduk yang terjadi dalam satu negara tertentu, misalnya antar provinsi, antar kota/kabupaten, migrasi dari wilayah perdesaan ke perkotaan atau seperti kecamatan ke kelurahan dan ke desa. Interval waktu yang terjadi pada migrasi internal adalah sekitar enam bulan atau lebih untuk menetap.
- d. Migrasi Sirkuler (migrasi musiman) adalah orang yang berpindah tempat tetapi tak bermaksud menetap di suatu tempat tujuan dan bersifat sementara (Budi.Suhanto, Dr.Rachmad. 2010 : 35-37).

2. Kriteria Migrasi

- a. Migran seumur hidup (*life time migrant*) adalah jenis migran pada saat pengumpulan data adalah yang tempat tinggalnya berbeda dengan tempat tinggalnya pada waktu lahir.
- b. Migran langsung (*recent migrant*) adalah jenis penduduk yang pada saat terdata secara valid pernah bertempat tinggal di tempat yang berbeda dengan tempat tinggal pada waktu pengumpulan data.
- c. Migran total (*total migrant*) adalah migrant yang pernah bertempat tinggal di tempat yang berbeda dengan tempat tinggalnya pada waktu pengumpulan data (Budi.Suhanto, Dr.Rachmad. 2010 : 38-39).

3. Faktor Penarik dan Pendorong Migrasi

Migrasi umumnya dipengaruhi oleh daya dorong (*push factor*) suatu wilayah dan daya tarik (*pull factor*) wilayah lainnya.

- a. Faktor-faktor pendorong (*push factor*) antara lain : semakin berkurangnya sumber-sumber kehidupan seperti menurunnya daya pendukung lingkungan, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin sukar diperoleh seperti hasil tambang, kayu, atau bahan dari pertanian. Menyempitnya lapangan kerja di tempat asal. Munculnya tekanan-tekanan seperti politik, agama, dan suku, sehingga mengganggu hak asasi penduduk di daerah asal. Alasan pendidikan, pekerjaan, atau perkawinan, bencana alam, dan wabah penyakit.
- b. Faktor-faktor penarik (*pull factor*) antara lain : adanya sebuah harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf ekonomi atau hidup. Sebuah kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Keadaan lingkungan

atau kondisi kehidupan yang lebih baik misalnya iklim, perumahan, sekolah, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya. Adanya banyak tempat interaksi sosial di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang dari daerah yang terbelah kecil dan tak terlalu padat untuk bermukim di metropolitan (Budi.Suhanto, Dr.Rachmad. 2010 : 40).

Menurut Khaild Koser, ada dua kategori dari pergerakan imigrasi internasional yang dilakukan oleh para imigran yaitu migran sukarela dan dipaksa. Migran dipaksa dimaknai dengan keterpaksaan untuk meninggalkan negara asal karena konflik, penganiyaan, atau disebabkan oleh kondisi lingkungan seperti kekeringan atau kelaparan. Keberadaan migran bersifat sukarela biasanya dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi. Tujuan berpindah adalah untuk mencari pekerjaan, memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik dengan kondisi kerja yang lebih kondusif. Dalam perkembangannya, migran bersifat sukarela ini sering diklasifikasikan sebagai imigran non terampil dan imigran terampil (<http://bookfi.net/dl/1054993/bf844e>).

Konsep Negosiasi

Negosiasi adalah kegiatan mendiskusikan sesuatu dan menghasilkan sebuah kesepakatan. Berdasarkan pengungkapan asal kata negosiasi, berkembanglah ragam pengertian, pendapat, dan definisi dari para ahli. George M Hartmann, negosiasi adalah proses sebuah diskusi antar dua pihak dengan masing-masing tinjauan mencoba untuk mencapai kesepakatan bersama. Stephen Kozicki, negosiasi adalah seni untuk mencapai sebuah kesepakatan yang memecahkan perbedaan pendapat. Henry Kissinger, negosiasi adalah proses mengombinasikan sebuah konflik untuk menjadi positif dibawah ketentuan peraturan secara bulat (Lumuba Patrice. 2013 : 5-9).

Proses Negosiasi dilakukan melalui tiga tahapan, yakni; Pra-Negosiasi, Proses Negosiasi, dan Evaluasi.

1. Pra-Negosiasi

Pada dasarnya adalah akumulasi dari seluruh jenis-jenis kegiatan yang dilakukan sebelum tahapan negosiasi resmi, pada hakekatnya Pra-negosiasi merupakan tahapan pertama negosiasi resmi yang ditujukan untuk mencapai kesepakatan, terutama dalam tiga hal pokok;

- a. Kesepakatan mengenai keuntungan bersama, yang dimaksudkan bahwa pihak-pihak harus memiliki motivasi untuk melakukan kolaborasi dibandingkan kompetisi. Mereka harus berkomitmen terhadap tujuan yang saling menguntungkan daripada mengejar kebutuhan masing-masing antar dua pihak
- b. Kesepakatan agenda, merupakan tindak lanjut dari kesepakatan-kesepakatan yang telah ditempuh. Agenda ini mencakup substansi materi yang akan dibahas, urutan-urutan prioritasnya, waktu, tempat pelaksanaan, serta tingkatan status negosiatornya.
- c. Kesepakatan Prosedur, ketika agenda disetujui, maka tahapan terakhir dari Pra-negosiasi adalah kesepakatan prosedur. Kesepakatan prosedural ini akan menuntut bagaimana isu-isu yang substantif dalam proses negosiasi akan dimulai, dan memudahkan pencapaian kesepakatan. Kesepakatan prosedural ini meliputi format negosiasi baik dalam bentuk bilateral, multilateral yang termasuk dalam format diskusi parallel, atau kombinasi keduanya.

2. Proses Negosiasi

- a. Persiapan, pada dasarnya perlu melakukan persiapan dan membuat perencanaan, yang dapat meliputi: identifikasi masalah, menemukan kepentingan, saling berkonsultasi satu sama lain, mengatur pengaturan dan strategi tujuan, mengidentifikasi batas kemampuan, mengembangkan argument pendukung, dan menganalisa pihak lain.
- b. Perencanaan, dalam tahapan negosiasi harus merencanakan sesuatu yang matang.

3. Evaluasi

Setelah menyelesaikan proses negosiasi, masing-masing pihak perlu membuat catatan evaluasi dari seluruh rangkaian pelaksanaan negosiasi apakah yang berupa keberhasilan, ketertundaan, dan ketidakberhasilan. Hal ini di perlukan untuk berproses ke bentuk lainnya. Hasil-hasil dari setiap pertemuan mempunyai nilai rangkaian bagi pertemuan berikutnya karena meskipun proses negosiasi telah di tandatangi ke sebuah dokumen, tidak berarti proses negosiasi telah selesai, karena itu sering dianggap suatu permualan, dan dapat ditindaklanjuti dengan negosiasi lanjutan yang memberi peluang untuk membuka masalah-masalah baru (Lumuba Patrice. 2013 : 16-28, 31).

Tujuan dasar dari negosiasi adalah perdamaian dan mencapai kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dengan kata lain, negosiasi menuntut hasil akhir yang sifatnya “*win-win solution*”. Adapun tujuan negosiasi sebagai berikut :

- a. Negosiasi untuk menyetujui pembukaan hubungan diplomatik, atau untuk mencapai persetujuan mengenai kerja sama regional di bidang ekonomi dan industri
- b. Negosiasi untuk menyetujui perumusan komunique bersama (*join comunique*) khususnya menyangkut naskah, cara penafsiran, dan substansinya
- c. Negosiasi untuk mencapai persetujuan tentang normalisasi (*normalisation agreement*) guna mengakhiri konflik melalui gencatan senjata, pemulihan hubungan diplomatik, perjanjian perdamaian, dan sebagainya.

Satu pihak atau lebih mencari tujuan yang tidak berhubungan dengan pencapaian persetujuan. Negosiasi untuk pencapaian tujuan dengan pertimbangan perubahan baru dengan melakukan renegosiasi. Setelah sekian masa perjanjian berlaku, di antara para pihak menunjukkan kondisi atau perkembangan baru yang belum tercakup dalam perjanjian. Karena tidak ada relevansinya dengan perkembangan baru, agar perjanjian tetap berlaku, para pihak menciptakan pengaturan kewajiban baru yang berbeda. Contohnya seperti dalam bentuk penyerahan tingkat kekuatan hukum dan politik kepada lembaga internasional dengan pengaturan baru (Drs. Mohammad Shoelhi. 2011 : 116-117). Untuk mencapai sebuah pengaturan baru dari suatu perjanjian yang berlaku, negara-negara yang terlibat dalam penandatanganan dan ratifikasi sebuah perjanjian dapat menyatakan klaim jika sebuah perjanjian yang tidak adil atau tidak seimbang harus ditinjau kembali seperti perbatasan-perbatasan wilayah atau kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam perjanjian harus disesuaikan. Karena alasan inilah, maka adanya amandemen dan modifikasi kemungkinan lebih tepat untuk perubahan demikian (T.May Rudy. 2006 : 133).

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dimana penulis menggambarkan Upaya Inggris Dalam Menangani Imigran Uni Eropa. Jenis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan *library research*, teknik analisis data kualitatif karena penelitian ini hanya memaparkan situasi dan peristiwa dengan menjelaskan dan menggambarkan tentang Upaya Inggris Dalam Menangani Imigran Uni Eropa pada masa Cameron tahun 2014-2016.

Hasil Penelitian

Sistem migrasi yang di terapkan oleh Uni Eropa adalah pergerakan bebas kerja dimana semua negara anggota UE dapat menerapkannya. Hal ini bermula dari penandatanganan *Treaty of European Union* di Maastricht tahun 1993 sebagai awal pembentukan UE.

Pasar Bebas Tenaga Kerja di Uni Eropa

Pada tahun 1993, komisi Eropa menerbitkan Buku Putih mengenai pertumbuhan, daya saing, dan pekerjaan yang mengakui masalah pengangguran berskala besar di negara-negara UE secara terus-menerus. Serangkaian tindakan yang berpotensi menciptakan pekerjaanpun dilakukan yaitu menerapkan pembagian kerja, pengekangan upah, biaya jaminan sosial yang lebih rendah untuk majikan serta insentif. Hal itu didasari untuk mengurangi separuh pengangguran dengan target menciptakan 15 juta pekerjaan.

Dalam perkembangannya tercipta adanya gagasan baru dari Maastricht ke Amsterdam tentang kebijakan ketenagakerjaan yaitu menerapkan reformasi sistem kesejahteraan dengan memberikan kemudahan untuk kesejahteraan bekerja bagi para pekerja imigran. Kemudian untuk menghadapi pengangguran di UE, sektor negara juga melakukan privatisasi lapangan kerja kepada sektor swasta. Hasilnya pada tahun 2000 tingkat penciptaan lapangan kerja terbukti sangat menantang banyak negara anggota UE Eropa Barat. Hal ini tidak dapat mencerminkan keadaan ekonomi dan potensi penciptaan lapangan kerja masing-masing negara anggota, hal ini juga disebabkan oleh rendahnya tingkat mobilitas geografis para negara anggota Eropa Barat saat itu, serta surplus pekerjaan yang di buat satu negara anggota tak mampu mengisi sektor pekerjaan yang kurang di sektor lain. Dengan demikian hanya sedikit pengaruh terhadap pengurangan jumlah pengangguran di negara-negara Eropa Barat. Oleh karena itu perluasan keanggotaan UE dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini (<http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12044&langId=en>).

Tahun 2004-2014 adalah masa transisi ekonomi yang dinamis di wilayah UE. Hal ini ditandai dengan diperlakukannya perluasan anggota UE yang disebut negara aksesi yang berasal dari negara-negara Eropa Timur yaitu Polandia, Lithuania, Latvia, Ceko, Hungaria, Slovenia, Slovakia, Estonia, Malta dan Siprus. Faktanya setelah tahun 2004 aliran tenaga kerja yang besar menuju ke Eropa Barat, menyumbang sekitar 60% dari gerakan populasi intra-UE. Ada banyak alasan mengenai perluasan keanggotaan UE. Pertama, adanya perbedaan besar dalam tingkat pendapatan dan peluang pasar tenaga kerja antara negara-negara Eropa Barat dan Eropa Timur. Kedua, semua negara-negara Eropa Timur ini masih dalam proses transisi sosio-ekonomi serta regulasi kelembagaan yang belum memadai dan harus ditangani. Ketiga, setidaknya beberapa dari negara-negara Eropa Timur ini telah menghadapi hambatan yang serius terhadap mobilitas di masa lalu dan karenanya tidak mengalami migrasi substansial sebelum perluasan UE. Selama periode perluasan pekerja UE di tahun 2004-2006. Negara-negara Eropa Barat dapat membatasi masuk arus imigran dengan berbagai jenis perizinan kerja sesuai dengan periode transisi. Dalam hal ini Swedia, Irlandia, dan Inggris tidak membatasi perluasan pekerja UE dengan membuka pasar tenaga kerja untuk imigran Eropa Timur. Italia dan Belanda menetapkan kouta khusus untuk negara-negara Eropa Timur. Denmark dan

Norwegia memperlakukan pasar tenaga kerja bagi para pekerja Eropa Timur dengan syarat para pekerja ini memiliki tawaran kerja penuh untuk kondisi kerja regular.

Sedangkan, Jerman dan Austria memperlakukan ijin kerja kurang lebih dua belas bulan secara hukum kepada pekerja. Inggris menerapkan skema registrasi pekerja sebagai bentuk aplikasi perizinan untuk memantau arus masuk dan klaim sistem tunjangan kesejahteraan untuk para pekerja Eropa Timur. Irlandia menggunakan sistem Nomor Layanan Pribadi untuk mendaftarkan para pekerja UE dan ada sekitar 66.000 Nomor Layanan Pribadi untuk periode masuk imigrannya di tahun 2004-2006. Sedangkan beberapa negara-negara Eropa Barat lainnya tidak mempunyai aplikasi khusus untuk para pekerja UE. Sebagian besar imigran Eropa Timur ini adalah muda dan lajang. Kebanyakan dari para pekerja ini bekerja di sektor administrasi, jasa bisnis, manufaktur, perhotelan, katering, dan pertanian yang termasuk dalam jenis pekerjaan non terampil (<https://www.cesifogroup.de/ifoHome/facts/DICE/Migration/Migration/Labour-Migration/DR3-06-Imp-EU-Lab-Mig/fileBinary/DR3-06-Imp-EU-Lab-Mig.pdf>).

Selama 1 dekade terakhir dari tahun awal perluasan tahun 2004 hingga 2014, pergerakan imigrasi pasar bebas tenaga kerja UE menghasilkan jumlah yang semakin banyak, terutama pergerakan imigrasi Eropa Timur bermayoritas sebagai pemasok dan negara-negara Eropa Barat sebagai penerima. *European Commission* menunjukkan ada 5 negara UE dengan jumlah pekerja imigran UE tertinggi yaitu Jerman (2,5 juta), Inggris (2 juta), Spanyol (1,5 juta), Italia (1,2 juta), dan Perancis (1 juta). Jumlah mayoritasnya berasal dari Eropa Timur seperti Rumania, dan Polandia, serta satu negara Eropa Barat yaitu Portugis (<http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15881&langId=en>).

Dalam perkembangannya, pasar tenaga kerja Eropa mempunyai berbagai dampak dari perluasan imigran negara ketiga di UE khususnya ke negara Eropa Barat. Pertama, dampak terhadap pasar tenaga kerja memiliki efek positif. Pertama, membantu negara penerima untuk ditempatkan di suatu sektor pekerjaan yang berada di area khusus dimana sektor pekerjaan ini di hindari oleh pekerja lokal dengan alasan menolak tidak mau dibayar dengan upah yang wajar, misalnya konstruksi, layanan domestik, hotel, dan sektor restoran. Kedua, imigrasi Eropa Timur dapat berkontribusi dalam kewirausahaan, keragaman dan inovasi, misalnya imigran yang terampil dapat menciptakan kemampuan inovatif dalam produksi ekonomi yang akan menciptakan industri baru dan meningkatkan pertumbuhan jangka panjang melalui akumulasi modal manusia. Ketiga, berkembangnya efisiensi pasar tenaga kerja yang meningkat karena imigrasi sehingga efeknya akan berdampak pada munculnya berbagai permintaan. Imigran Eropa Timur ini juga sangat responsif, karena perbedaan regional dalam peluang ekonomi dan memiliki keinginan untuk bekerja lebih besar dibandingkan dengan pekerja lokal.

Kemudian imigran Eropa Timur juga dapat meningkatkan fleksibilitas untuk pasar tenaga kerja karena imigran yang baru tiba cenderung bersedia menerima reservasi upah yang lebih rendah dan bersedia menerima pekerjaan dengan status tidak tetap atau musiman. Imigran juga biasanya membantu pekerjaan pekerja lokal dengan saling melengkapi yang mengarah pada efek positif dalam aktivitas ekonomi di negara penerima khususnya Eropa Barat.

Dampak selanjutnya adalah mengarah pada upah yang terlihat dari saling melengkapinya keterampilan antara imigran dan pekerja lokal dan melihat seberapa cepatnya imigrasi menyesuaikan diri dengan ekonomi. Model permintaan tenaga kerja jangka pendek pada pasokan tenaga kerja melalui imigrasi menyebabkan upah lebih rendah atau

penggangguran, dan jika upah tidak turun secara fleksibel. Jika imigran dan pekerja lokal memiliki keterampilan yang indentik dan menjadi pengganti sempurna untuk pekerja lokal, di sisi lain akan mendapat manfaat jika upah fleksibel, misalnya tenaga kerja lebih murah berarti keuntungan lebih tinggi. Jika komposisi keahlian imigran jauh berbeda dari pekerja lokal, pekerja lokal yang kemampuannya relatif langka akan saling melengkapi para imigran dan upahnya akan naik, sementara upah dari imigran yang mengganti pekerjaan pekerja lokal akan menurun. Dampak Terakhir adalah pada keuangan publik dan ketergantungan tunjangan kesejahteraan dipengaruhi oleh keberadaan imigran yang menerima berbagai tunjangan kesejahteraan misalnya sistem bantuan sosial, perawatan kesehatan, dan pendidikan tidak dapat ditutupi dari kontribusi pembayaran pajak para pekerja imigran sehingga menjadi beban dari negara penerima Eropa Barat untuk memberikan jaminan sosial atau tunjangan kesejahteraan kepada para pekerja imigran Eropa Timur (<http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2295&langId=en>).

Pasar Bebas Tenaga Kerja Uni Eropa di Inggris.

Pada kuartal terakhir di tahun 2014 dari ONS UK pekerja UE berjumlah 1,7 juta. Eropa Timur sekitar 908 ribu cenderung lebih banyak daripada Eropa barat sekitar 793ribu. Polandia menyumbang pekerja UE terbanyak di Inggris. Setelah di bukanya akses pekerja sektor tenaga kerja rendah ke Inggris tahun 2004 dengan masuknya pekerja dari Eropa Timur, menciptakan klasifikasi level pekerjaan seperti di pasar tenaga kerja Eropa pada umumnya. Di Inggris pun para pekerja UE yang melakukan imigrasi umumnya berstatus pendidikan tinggi, beragam usia. Orang-orang Eropa barat rata-rata berusia 40 tahun ke bawah, sedangkan orang-orang dari Eropa timur berusia 30 tahun ke bawah. Para imigran dari UE ini melakukan berbagai pekerjaan berdasarkan level kemampuan yaitu terampil dan non-terampil. Biasanya, imigran yang berasal dari Eropa barat cenderung bekerja dalam industri yang terampil, sedangkan imigran Eropa timur bekerja pada proposi yang dianggap non terampil di Inggris (<https://www.ons.gov.uk/file?uri=/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/adhocs/006712eua2eua8andeu14populationandemployment/countryofbirtheu14a216employmentpopulation20072016final.xls>).

-Alasan Imigran Uni Eropa memilih Inggris sebagai tujuan berimigrasi

Inggris menyediakan kemudahan akses tunjangan kesejahteraan kepada Imigran UE yang di bayar rendah (pekerja tunggal atau keluarga berpenghasilan rendah) yang mayoritasnya dari Eropa Timur, hal ini di tunjukan oleh paket pendapatan atau gaji yang sudah termasuk dari berbagai tunjangan kesejahteraan yang didapatkan bisa sampai 80% setelah pembayaran pajak pekerja imigran ini setelah menyesuaikan perbedaan biaya hidup di negara-negara Eropa Timur. Terdiri dari sistem tunjangan yang sangat kompleks mencakup berbagai jenis dukungan bagi individu dan keluarga.

Tunjangan-tunjangan ini bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti usia, penghasilan, jam kerja, struktur keluarga, biaya sewa, dan perawatan anak. Menurut penelitian dari *Migration Watch UK* misalnya seorang individu satu-satu pencari nafkah di dalam keluarganya yang mendapat 50 persen dari upah rata-rata yang relatif rendah akan mendapatkan gaji kotor per bulan dengan perkiraan £ 17.000 perbulan. Setelah dikurangi sekitar £ 2135 dalam pajak penghasilan dan sekitar £ 1258 dalam asuransi nasional ini tersisa sekitar £ 13.755. Keluarga ini kemudian akan menerima sekitar £ 3.952 dalam tunjangan perumahan, £ 6.897 dalam tunjangan keluarga serta £ 416 dari tunjangan kerja. Ini merupakan peningkatan 80 persen dalam tunjangan kesejahteraan setelah mendapatkan gaji dan kontribusi pajak. Sebaliknya negara UE Barat lainnya memberikan

pendapatan yang lebih besar dan pendapatan rumah tangga daripada tunjangan, negara-negara tersebut adalah Denmark, Luksemburg, dan Irlandia.

Kemudian untuk tunjangan lainnya yang telah di beri kemudahan oleh Inggris seperti kredit pajak untuk pekerja dengan penghasilan rendah, tunjangan anak, dan tunjangan pengangguran. Dalam akses mendapatkan tunjangan pengangguran atau tunjangan pencari kerja lebih mudah dan kontan didapatkan di Inggris daripada negara Eropa Barat lainnya. Di negara Eropa Barat lainnya, seorang individu hanya dapat mengklaim tunjangan ini ketika sudah bekerja untuk jangka waktu tertentu dengan berkontribusi pada sistem atau melakukan sejumlah pembayaran sebuah jaminan sosial. Ditambah, individu tersebut memerlukan sejumlah pembayaran tertentu yang harus dikerjakan sebelum memenuhi syarat untuk tunjangan pengangguran. Hal ini sangat berbeda di Inggris, tunjangan pengangguran yang tersedia bersifat kondisional, ketika si pekerja imigran mencari pekerjaan staf *jobcentre* akan memantau secara teratur calon pekerja untuk melihat si calon pekerja mendapatkan pekerjaan. Pencarian kerja yang dilakukan selama 6 bulan jika belum mendapatkan pekerjaan, si calon pekerja berhak mengklaim dan mendapatkan tunjangan pencari kerja berbasis pendapatan walaupun tidak membayar asuransi nasional (<https://www.migrationwatchuk.org/briefing-paper/284>).

Menurut *London School of Economics and Political Science* kemudahan para anak imigran untuk mendapatkan tunjangan anak lebih terbuka di Inggris dari negara UE lainnya. Di beberapa negara UE lainnya, jumlah klaim tunjangan anak untuk anak imigran UE lebih sedikit atau bahkan merata dengan warga lokalnya contohnya seperti di Belanda dan Italia. Subjek yang di maksud adalah klaim dari anak-anak imigran di negara-negara Eropa Timur. Sedangkan di Inggris, tunjangan anak di klaim lebih banyak oleh anak-anak imigran ini daripada warga lokal Inggris dikarenakan para keluarga memiliki anak yang lebih muda. Negara seperti Polandia, Lithuania, Latvia, dan Slovakia memiliki tingkat klaim dan pengambilan tunjangan secara signifikan (<http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06561#fullreporta>). Faktor terakhir daya tarik pekerja imigran UE ke Inggris adalah upah yang cenderung tinggi daripada negara UE lainnya berdasarkan perkiraan pendapatan disposisi rumah tangga rata-rata.

Keberadaan imigran UE di Inggris memberikan dampak positif kepada Inggris karena Imigran terampil memiliki keterampilan dan pengalaman yang lebih banyak daripada pekerja Inggris sehingga imigran melengkapi ketenagakerjaan bersama para pekerja Inggris bukan menggantinya serta imigran juga membantu meningkatkan upah dan produktivitas untuk semua orang secara merata (<https://www.theguardian.com/uk-news/2014/oct/19/immigration-policy-ukiprestrictions-european-union>).

Dampak negatif juga terlihat dari fiskal Inggris, berdasarkan lembaga penelitian migrasi dari *Migration Watch UK*, pekerja UE non terampil yang belum berkeluarga memberi dampak terhadap kontribusi pajak bersih yang berjumlah sekitar 1 £ lebih yang cenderung negatif ke saldo Inggris. Dengan bukti ini bahwa para pekerja minggunya dan sebagainya. Imigran non terampil ini dibebani pembayar pajak Inggris 3500 £ per tahun. Pembayar pajak Inggris juga membebani biaya tunjangan anak untuk anak-anak Imigran UE di negara anggota lainnya sekitar 36 juta £ per tahun non terampil menerima manfaat atau tunjangan kesejahteraan lebih banyak seperti kredit pajak, dan lainnya daripada membayar pajak. Pekerja tunggal akan menerima tunjangan kredit pajak lebih dari 10£ per minggunya, jika memiliki pasangan akan menerima lebih dari 50 £ per minggu

ditambah subsidi perumahan, dan jika memiliki anak akan menerima lebih dari 250 £ dengan tambahan tunjangan anak per dan lebih dari 1 juta £ per minggu (<https://www.migrationwatchuk.org/briefing-paper/1.38>).

Dampak negatif lainnya adalah adanya permasalahan keamanan yang di rasakan oleh Inggris melalui tindak kriminal yang dilakukan oleh warga negara UE yang menjalankan hak gerakan bebas mengganggu ketentraman dan keamanan di Inggris. ACRO badan kepolisian informasi cacatan kriminal Inggris bermitra dengan UKCA-ECR lembaga Inggris-UE untuk sistem pertukaran informasi data terbaru tahun 2014 menotifikasikan sekitar 11.313 jumlah warga negara UE yang melakukan kejahatan. Jenis kejahatannya meliputi kejahatan kekerasan seperti pembunuhan dan seksual ([https://www.acro.police.uk/uploadedFiles/Annual%20Report%20A4%202014-15%20Final%20Version\(1\).pdf](https://www.acro.police.uk/uploadedFiles/Annual%20Report%20A4%202014-15%20Final%20Version(1).pdf)).

Keberadaan imigran UE juga berdampak oleh Inggris selanjutnya adalah penipuan dan penyalahgunaan hak gerakan bebas yang menyasar kepada tunjangan kesejahteraan Inggris, di manfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dokumen berisi bukti kejahatan ini di publikasikan *Home Office* Inggris tahun 2013 dan di kirim ke komisi Eropa. Pada 3 November 2011, menurut dokumen *Home Office* Inggris menunjukkan jaringan kriminal di Polandia memperdagangkan lebih dari 200 calon pekerja ke Inggris. Para kriminal ini menjanjikan sekitar 230 korban akan dapat bekerja di Inggris, banyak diantara para imigran ini mengalami masalah kesehatan mental, lalu membiarkan para imigran ini untuk tinggal di Inggris dan menipu para korban agar menandatangani surat untuk membuka rekening bank, kemudian para kriminal ini dengan curangnya mengajukan permohonan tunjangan kesejahteraan seperti kredit pajak dan tunjangan lainnya menggunakan rincian korban dan mendapatkan uang yang dibayarkan ke akun yang baru di buat. Dalam dokumen ini juga dilaporkan bahwa jaringan kriminal tersebut telah mengklaim keuntungan dari tunjangan ini sekitar 2,9 juta poundsterling yang merugikan pihak Inggris (<https://www.telegraph.co.uk/news/politics/conservative/10597409/Home-Office-hid-dossier-on-EU-migrants.html>). Kenyataan ini, membuat Perdana Menteri Inggris David Cameron berupaya untuk menangani imigran UE di Inggris yang menerapkan prinsip gerakan bebas orang atas dampak-dampak negatif yang ada.

Upaya Inggris Dalam Menangani Imigran Uni Eropa Pada Masa Cameron Tahun 2014-2016.

Upaya Inggris dalam menangani imigran Uni Eropa dilakukan melalui berbagai cara hingga renegotiasi Inggris kepada UE dalam bentuk paket proposal reformasi perubahan terhadap peraturan imigrasi UE. Hal ini dilatar belakangi oleh arus imigrasi besar UE ke Inggris yang akhirnya menimbulkan berbagai dampak negatif seperti banyaknya imigran non terampil yang bermayoritas dari Eropa Timur tidak berkontribusi positif bagi fiskal Inggris, banyaknya tingkat kriminalitas sebagai konsekuensi dari hak pergerakan bebas orang, dan penipuan melalui penyalahgunaan sistem tunjangan kesejahteraan yang seharusnya diberikan untuk para pekerja imigran dimanfaatkan oleh jaringan kriminal untuk keuntungan sendiri. Untuk itu dilakukan berbagai upaya oleh Inggris dalam menangani imigran UE di tahun 2014-2016 dimana terdapat pada kebijakan yang termuat dalam paket proposal reformasi Perdana Menteri Inggris David Cameron, perubahan aturan sistem tunjangan kesejahteraan yang masih berkesinambungan dengan paket proposal reformasi, hingga Inggris melakukan renegotiasi kepada Uni Eropa dalam

bentuk paket proposal reformasi tersebut secara resmi untuk mendapatkan pengaturan baru di dalam peraturan UE pada KTT Uni Eropa 18-19 Februari 2016.

1. Pengajuan Paket Reformasi Proposal

Tahun 2014, Cameron merencanakan sebuah reformasi terkait upaya untuk menangani imigran UE dalam bentuk paket proposal reformasi dalam pidato pada 28 November tahun 2014 mengenai imigrasi. Proposal David Cameron adalah sebagai berikut :

- a. Pembatasan akses tunjangan kesejahteraan termasuk tunjangan anak. Dengan rincian reformasi :
 1. Para imigran UE yang baru tiba di Inggris, tidak akan mendapatkan tunjangan kesejahteraan atau perumahan sosial dan akan diberikan setelah 4 tahun tinggal dengan syarat harus berkontribusi untuk Inggris terlebih dahulu.
 2. Jika anak dari para imigran UE tinggal di Negara anggota lainnya, Inggris tidak akan memberikan tunjangan anak atau tunjangan kredit pajak anak, Meski berapa lama atau berapapun kontribusi terhadap Inggris.
- b. Pembatasan ketat bagi para pencari kerja UE. Dengan rincian reformasi:
 1. Inggris mensyaratkan para pencari kerja UE mempunyai tawaran pekerjaan sebelum datang ke Inggris dan menghimbau para pembayar pajak Inggris yang membebani tunjangan pengangguran untuk imigran UE.
 2. Membatasi rentang waktu para pencari kerja imigran untuk tinggal di Inggris secara legal dengan waktu selama 6 bulan, jika tidak menemukan pekerjaan dalam jangka waktu tersebut, akan diminta untuk pergi.
- c. Tindak lanjut dari penyalahgunaan gerakan bebas berisi tuntutan Inggris untuk menerapkan kekuatan yang lebih kuat untuk mendeportasi kriminal, menghentikan dan larangan masuk kembali secara regas bagi para imigran yang menyalahgunakan gerakan bebas termasuk penipu, dan para penjahat.
- d. Pembatasan ketat dari migrasi dari negara anggota UE berisi tuntutan Inggris kepada negara-negara anggota baru UE di masa depan, hak gerakan bebas tidak akan berlaku untuk imigran baru sampai ekonomi dari negara-negara anggota baru setara dengan negara-negara anggota yang ada (<https://openeurope.org.uk/intelligence/immigration-and-justice/legal-implications-david-cameros-proposed-reforms-eu-migration>).

Akan tetapi, paket reformasi tersebut mendapat penolakan dari Kanselir Jerman Angela Merkel, dan semua mitra Inggris di UE karena membutuhkan perubahan perjanjian perubahan UE beserta dukungan suara secara bulat dari semua negara-negara anggota UE setelah Merkel menyuarakannya di Jerman. Di bulan Januari 2015 Merkel wakil dari Dewan Eropa dan Cameron bertemu untuk membahas tuntutan Inggris lebih lanjut dan Merkel menemukan solusi dari permasalahan Inggris tersebut. Kemudian, untuk prospek pembicaraan selanjutnya Cameron harus memenangkan terlebih dahulu pemilu Perdana Menteri pada Mei 2015.

2. Universal Credit

Setelah tuntutan reformasi sebelumnya tidak terlaksana. Pada 9 Maret 2015, Inggris mengeluarkan kebijakan di bawah departemen pekerjaan dan pensiun menerapkan peraturan di bawah "*Universal Credit*" yang didasari dalam pidato imigrasi tahun 2014. David Cameron berkeinginan untuk memperbarui sistem pembayaran untuk tunjangan kesejahteraan yang lebih menitikberatkan pencari kerja bagi imigran UE yang baru datang serta tidak akan memberikan tunjangan pengangguran lagi. Dimana

aturan dari “*Universal Credit*” ini yaitu tidak akan ada rumah tangga UE yang dapat mengakses tunjangan yang telah teruji kecuali dengan bekerja terlebih dahulu. Ini adalah salah satu paket reformasi proposal Cameron pada pidato tersebut.

Tindakan ini dilakukan untuk mengurangi jatuh waktu untuk mengklaim tunjangan kesejahteraan seperti kredit pajak, kredit pajak anak, dan tunjangan anak yang berarti jika imigran baru ini tidak punya pekerjaan setelah 3 bulan akan di deportasi dari Inggris, selain itu para imigran baru ini juga tidak bisa mendapat akses tunjangan perumahan lagi. Aturan baru yang cukup ketat ini adalah bagian dari rencana ekonomi jangka panjang yang bertujuan untuk melindungi sistem tunjangan dan memastikan imigran UE yang baru tiba beralasan untuk berkontribusi terhadap perekonomian serta untuk menciptakan sistem yang adil untuk semua pekerja termasuk pekerja lokal. Adapun regulasi untuk para pencari kerja UE agar mendapat tunjangan kesejahteraan meliputi :

1. Setelah 3 bulan, para pencari kerja UE harus mengambil uji kepemilikan tetap yang lebih kuat jika para imigran ingin mengklaim tunjangan kesejahteraan berbasis pendapatan.
2. Setelah 3 bulan dalam sistem tunjangan pencari kerja, para imigran ini harus memiliki tes pekerjaan yang benar serta harus mengambil uji kepemilikan tes pekerjaan yang benar dari sebuah pekerjaan, jika tidak memiliki tawaran kerja ini para imigran maka akan kehilangan hak mereka untuk tinggal di Inggris sebagai pencari kerja.
3. Imigran UE yang mengaku telah bekerja atau bekerja sendiri dan berhak mendapatkan akses ke berbagai tunjangan kesejahteraan yang lebih bervariasi, sekarang menghadapi aturan yang lebih kuat dari Inggris untuk memutuskan statusnya apakah dianggap sebagai pekerja atau mantan pekerja dengan penghasilan yang tersisa (<https://www.gov.uk/government/news/eu-jobseekers-barred-from-claiming-universal-credit>).

Di dalam pedoman peraturan UE, negara-negara anggota di perbolehkan membuat mekanisme mengenai cara pekerja imigran untuk mendapatkan berbagai tunjangan kesejahteraan baik itu tunjangan berbasis pendapatan atau tunjangan luar kerja dengan regulasi masing-masing. Seperti yang dilakukan Inggris dengan *Universal Credit*nya. Kemudian, negara-negara anggota juga dapat mendeportasi pekerja imigran atas dasar alasan yang logis seperti kebijakan publik, keamanan publik, dan kesehatan masyarakat. Tetapi ini pengecualian seperti untuk membatasi, memblokir, atau menghapus pergerakan imigrasi UE dalam keadaan si pekerja imigran mencari pekerjaan dan sebagainya yang masih dianggap wajar oleh UE. Tindakan keras Inggris yang akan mendeportasi imigran UE ketika tidak mendapatkan pekerjaan selama 3 bulan di dalam regulasi *Universal Credit* sudah di luar batas dari peraturan UE. Oleh karena itu hal seperti ini perlu renegosiasi lebih lanjut dengan UE.

3. Renegosiasi Inggris di KTT Uni Eropa 18-19 Februari 2016

Setelah terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Inggris, David Cameron dan para pemimpin Eropa mengadakan pembicaraan tentang prospek renegosiasi Inggris pada bulan Juni 2015 menjelang sebuah KTT UE. Diskusi yang mencakup reformasi peraturan UE telah dipertimbangkan oleh para pemimpin Eropa dan menyetujui renegosiasi Inggris beserta keinginan Cameron untuk mereformasi keanggotaan Inggris di UE melalui referendum tahun 2017. Diskusi secara teknis pun dilakukan. Sedangkan reformasi yang akan dilakukan adalah merubah undang-undang sekunder UE tentang imigrasi yang terdiri dari peraturan, arahan, dan keputusan yang diadopsi

oleh lembaga-lembaga UE menggunakannya sebagai dasar hukum. Legislasi Sekunder UE dapat diberlakukan lebih cepat daripada amandemen perjanjian karena tidak memerlukan ratifikasi dari negara-negara anggota. Legislasi sekunder UE dapat diadopsi atau diterapkan tergantung pada waktu dan hasil dari referendum ini.

Pada 10 November 2015, David Cameron menulis surat kepada Donald Tusk untuk menetapkan prioritas negosiasi dan persetujuan resmi untuk paket proposal reformasi. Dilihat dari beberapa upaya yang dilakukan Inggris sebelum 2016 Inggris akhirnya menyatukan semua tuntutan tersebut termasuk *universal credit* dalam renegotiasi kepada UE dalam bentuk paket proposal reformasi yang termasuk tuntutan dalam perubahan aturan sistem tunjangan kesejahteraan, dan mekanisme pendeportasian warga UE yang melakukan penipuan dan kejahatan. Renegosiasi Inggris kepada UE adalah paket reformasi Inggris terhadap peraturan UE. Paket ini di bahas oleh Presiden Dewan Eropa Donald Tusk dan para pemimpin UE dari semua 27 negara anggota dalam sidang Dewan Eropa di Brussels pada tanggal 18-19 Februari 2016. Persetujuan paket reformasi ini juga memberi status spesial kepada Inggris terkait imigrasi UE di Inggris. Dimana rincian lengkap permintaan Inggris, serta kesepakatan dan perubahan dari UE sebagai berikut :

a. Mekanisme “*emergency brake*”

Permintaan Cameron mengenai hal ini adalah pembatasan tunjangan kerja dalam jangka waktu 4 tahun untuk imigran atau pekerja yang baru tiba. Di dalam kesepakatan UE merujuk pada reformasi peraturan UE untuk mengatur apa yang disebut Inggris “*emergency brake*”. Dimana setiap negara anggota berhak melaporkan otoritas UE ketika mengalami arus masuk besar dari pekerja dan periode waktu cukup panjang yang berimplikasi pada aspek penting dari sistem jaminan sosial, menyebabkan kesulitan serius dalam pasar tenaga kerja dan membuat tekanan kepada pelayanan publik. Dalam kondisi tersebut, anggota parlemen UE dapat memberi wewenang kepada negara penerima tertentu untuk membatasi tunjangan kerja bagi pekerja imigran yang baru datang sampai empat tahun setelah mulai bekerja, dan tak perlu izin bekerja. Selain itu, pembatasan ini juga dapat disimpan hingga 7 tahun tetapi hanya dapat dipakai satu kali. Pembatasan ini tidak berlaku untuk imigran yang sudah bekerja di negara penerima. Dalam hal ini, Inggris mendapatkan keistimewaan yaitu dapat langsung diminta dan diterapkan kepada para imigran, dengan kata lain komisi Eropa telah mempercayai Inggris atas keistimewaan yang di jalankan Inggris (<https://fullfact.org/europe/explaining-eu-deal-emergency-brake/>).

b. Mendeportasi Imigran Uni Eropa

David Cameron mengusulkan permintaan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat untuk mendeportasi penjahat, menghentikan kembali, dan mencegahnya masuk di tempat pertama. Gerakan bebas orang dalam hukum UE adalah salah satu prinsip vital yang membentuk hukum utama UE. Kenyataannya tidak mutlak karena negara penerima dapat memblokir hak gerakan bebas untuk alasan seperti kebijakan publik, keamanan publik, dan kesehatan masyarakat. Tindakan kejahatan adalah penghinaan dan pengecualian untuk gerakan bebas. Terkait peraturan gerakan bebas orang kepada negara penerima, UE menerapkan undang-undang yang disebut “*Citizens Rights Directive*” yang menyatakan bahwa semakin lama seorang imigran tinggal di negara penerima, maka semakin banyak hak yang mereka dapatkan dan semakin sulit untuk membatasi dan menghapusnya. Dalam rentang waktu yang ada si negara penerima dapat mendeportasi. Misalnya nol-tiga

bulan ketika Inggris dapat menolak suatu individu masuk dan mendeportasi imigran atas dasar kebijakan publik, keamanan publik, dan alasan kesehatan masyarakat. Tiga bulan-lima tahun ketika Inggris dapat mendeportasi individu dengan alasan kebijakan publik dan alasan keamanan. Lima tahun-sepuluh tahun ketika Inggris dapat mendeportasi individu dengan alasan serius terhadap kebijakan publik dan keamanan publik. Sepuluh tahun dan seterusnya ketika Inggris dapat mendeportasi individu berdasarkan alasan yang mengharuskan menyelesaikan masalah untuk keamanan publik. Beragam kasus yang ada di pengadilan UE mempertanyakan hak gerakan bebas dari “*Citizens Rights Directive*”, apakah alasan kebijakan publik atau keamanan publik yang mendeportasi suatu individu secara proposional berpotensi menimbulkan ancaman yang serius kepada salah satu kepentingan mendasar masyarakat di negara penerima. Negara-negara tidak dapat mendeportasi suatu individu atas tindakan sendiri yang bersifat subjektif. Di dalam kesepakatan UE, secara halus mengubah aturan gerakan bebas untuk mempermudah negara-negara anggota untuk mendeportasi imigran UE dengan lebih kuat. Pertama, kesepakatan tersebut secara halus menyeru negara-negara anggota memperhitungkan perilaku para imigran yang memungkinkan memiliki ancaman atau tidak. Kedua, kesepakatan itu menghimbau kepada negara-negara anggota untuk menelusuri lebih dalam riwayat perilaku imigran yang bersangkutan tersebut di masa lalu. Dalam kesepakatan itu juga menyatakan bahwa ancaman mungkin tidak harus terjadi secara langsung. Kemudian dalam kesepakatan itu juga mengatakan bahwa dengan tidak adanya keyakinan pidana sebelumnya, dapat mendeportasi imigran UE untuk alasan pencegahan sampai para perilaku diimplementasikan dan di uji dalam hukum Eropa melalui pengadilan Eropa di pengadilan HAM Eropa. Kesepakatan bersama dari semua pemimpin UE akan memberikan negara-negara anggota lebih banyak kekuatan untuk mendeportasi penjahat dan mencegahnya kembali. Permintaan proposal Perdana Menteri sebelumnya yaitu berisi “larangan masuk kembali yang lebih ketat dan lebih lama bagi orang asing yang melakukan penipuan”. tidak menghasilkan pengaturan baru secara khusus dari kesepakatan renegotiasi ini. Tetapi proposal ini telah memenuhi syarat mengikuti hasil dari kesepakatan UE mengenai “mendeportasi imigran UE” ini (<https://fullfact.org/europe/explaining-eu-deal-deporting-eu-immigrants/>).

c. Memperketat Pembayaran Tunjangan Anak

Gagasan dalam kesepakatan untuk mengatur tunjangan anak ini didasari oleh peraturan UE yaitu para imigran tertentu diperbolehkan mengirim tunjangan anak dari negara tempatnya bekerja di negara penerima ke negara asalnya yaitu anaknya. Dalam kesepakatan ini UE menyeru kepada negara-negara penerima untuk menindaklanjuti dengan mempertimbangkan jumlah yang akan dibayarkan. Oleh karena itu, kesepakatan itu juga dapat menyesuaikan pembayaran berdasarkan standar hidup di negara tempat anak tersebut tinggal, dan tingkat tunjangan anak yang dibayar di negara tersebut. Khusus untuk Inggris, mekanisme pembayaran tunjangan anak masuk dalam kesepakatan “*emergency brake*” yang membatasi pembayaran tunjangan anak selama 7 tahun bagi pekerja imigran yang baru tiba. Peraturan ini berlaku mulai 1 Januari 2020 (<https://fullfact.org/europe/explaining-eu-deal-exporting-child-benefit/>).

Hasil dari renegotiasi peraturan UE kepada Inggris adalah status *special* yang berarti perubahan akan langsung diterapkan cepat kepada Inggris. Pertama, pengenalan mekanisme upaya perlindungan untuk membatasi tunjangan

kesejahteraan ketika ada arus imigrasi besar ke Inggris selama empat tahun dan tetap bertahan selama tujuh tahun dan tidak dapat diperpanjang. Hal ini hanya berlaku kepada imigran yang baru tiba. Kedua, menghentikan praktik pengiriman tunjangan anak ke luar negeri dari Inggris. Berdasarkan hasil kesepakatan bahwa imigran yang baru tiba berhak memberikan tunjangan anak kepada anaknya masing-masing yang sudah menyesuaikan dengan standar hidup tempat anak tersebut tinggal. Selain itu, dasar dari renegotiasi ini adalah status keanggotaan Inggris di UE. Referendum keanggotaan Inggris di UE adalah indikator utama dalam kronologi renegotiasi. Untuk dapat merealisasikan penawarannya menjadi sebuah undang-undang pengindeksan regulasi baru pengiriman tunjangan anak dan pengenalan “*emergency brake*” yang akan mereformasi undang-undang sekunder UE yaitu peraturan pergerakan bebas kerja yang saat ini diterapkan semua anggota UE, maka hasil kesepakatan akhir Inggris harus menunggu hasil vote referendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Jika menunjukkan hasil positif, Inggris akan keluar dari keanggotaan dan undang-undang tersebut tidak akan diimplementasikan. Tetapi ketika hasilnya negatif, Inggris akan bertahan. Kemudian, Komisi Eropa akan membuat undang-undang tersebut lalu Dewan Eropa mensahkan undang-undangnya dan akan menerapkannya ke kasus Inggris. Hasil Referendum keanggotaan Inggris di UE tanggal 23 Juni 2016 menunjukkan positif Inggris keluar dari keanggotaan UE yaitu 51,9 % tinggal, dan 48,1 % tetap, sehingga pembuatan undang-undang tak jadi di implementasikan ([http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573303/EPRS_BRI\(2016\)573303_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573303/EPRS_BRI(2016)573303_EN.pdf)).

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas disimpulkan bahwa upaya Inggris dalam menangani Imigran Uni Eropa adalah tuntutan paket proposal reformasi Inggris dalam renegotiasinya terhadap peraturan imigrasi UE di KTT Uni Eropa 18-19 Februari 2016 yaitu 1). Pembatasan pembayaran tunjangan kesejahteraan untuk pekerja imigran yang baru tiba selama 4 tahun. 2). Ingin memperoleh kekuatan yang lebih kuat untuk mendeportasi penipu, dan penjahat serta menghentikan dan larangan masuk kembali yang lebih keras dan lebih lama. 3). Menghentikan ekspor tunjangan anak ke negara UE lainnya. Kemudian, kesepakatan dari UE adalah 1). Pembatasan tunjangan kesejahteraan selama empat tahun, serta pembatasan selama tujuh tahun, hal ini bisa diterapkan oleh negara anggota tertentu yang mengalami arus besar pekerja imigran dengan memberitahu kepada otoritas UE. 2). Untuk menerapkan kekuatan yang lebih kuat dalam mendeportasi penjahat dan penipu UE sepakat memperhalus proses deportasi dengan mempertimbangkan dan melihat riwayat dari masa lalu sebelum di deportasi, dan menyeru negara anggota lebih bersabar melakukan proses pendeportasian dengan meninjau perilaku diimplementasikan dan di uji dalam pengadilan eropa. 3). UE menyepakati mekanisme ekspor tunjangan anak, menyeru anggota UE dengan mempertimbangkan jumlah yang dibayarkan berdasarkan standar hidup di negara UE tempat anak tersebut tinggal. Sedangkan, status *special* untuk Inggris yang berarti mendapatkan keistimewaan yaitu dapat langsung menerapkan apa yang disebut “*emergency brake*” terkait pembatasan pembayaran tunjangan kesejahteraan berserta tunjangan anak selama 7 tahun. Hasil dari renegotiasi peraturan UE kepada Inggris adalah status *special* untuk Inggris yang berarti mendapatkan keistimewaan yaitu dapat langsung menerapkan apa yang disebut “*emergency brake*” terkait pembatasan pembayaran tunjangan kesejahteraan selama 4 tahun berserta mekanisme baru pembayaran tunjangan anak dalam bentuk undang-undang. Tetapi hasil kesepakatannya

Inggris harus melihat terlebih dahulu hasil referendum keanggotaan Inggris di UE pada 23 Juni 2016 lebih cepat dari yang ditetapkan Inggris. Jika menunjukkan hasil positif, Inggris akan keluar dari keanggotaan dan undang-undang tersebut tidak akan diimplementasikan. Tetapi ketika hasilnya negatif, Inggris akan bertahan. Kemudian, Komisi Eropa akan membuat undang-undang tersebut dan Dewan Eropa mensahkannya dan akan menerapkannya ke kasus Inggris. Hasil Referendum keanggotaan Inggris di UE tanggal 23 Juni 2016 menunjukkan positif Inggris keluar dari keanggotaan UE sehingga undang-undang tak jadi di implementasikan.

Saran

Alasan terkait dari renegotiasi Inggris adalah permasalahan imigrasi terhadap Inggris, sebaiknya dalam regulasi UE dapat mengupgrade isi-isi atau hak-hak pekerja setiap tahun yang disesuaikan dengan kondisi sistem imigrasi di negara anggota sehingga nantinya negara anggota lain tidak perlu melakukan tuntutan reformasi regulasi imigrasi UE seperti yang dilakukan Inggris. UE seharusnya membuat regulasi khusus mengenai hak-hak pencari kerja pekerja imigran yang mencari kerja atau pekerja yang tidak aktif secara ekonomi di negara anggota, hal ini disebabkan oleh tidak adanya regulasi khusus UE mengenai hak-hak para pekerja UE yang tidak aktif dan hal ini masih menjadi pokok diskusi yang intens para anggota UE karena tidak memiliki status pekerja untuk dipertahankan.

Daftar Pustaka

Buku

Dr. Rahmad, Budi. Suharto. 2010. *Teori-Teori Demografi (Suatu Pengantar)*. Jember: *Center for Society Studies (CSS)*.

Lumumba Patrice. 2013. *Negosiasi dalam Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sutarjo Adisusilo J.R., 2006. *Integrasi Ekonomi Eropa dari Pasar Bersama Sampai Euro*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

T.May Rudy, S.H., M.IR., M.Sc. 2006. *Hukum Internasional 2*. Bandung: PT Refika Aditama.

E-jurnal

Khalid Khoser. 2007. *INTERNATIONAL MIGRATION A Very Introduction*. <http://bookfi.net/dl/1054993/bf844e>. Diakses 25 Februari 2018.

Internet

_____. 2013. "*The Lisbon Treaty*". <http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-the-functioning-of-the-european-union-and-comments/part-3-union-policies-and-internal-actions/title-iv-free-movement-of-persons-services-and-capital/chapter-1-workers/187-article-45.html>.

_____. 2018. "*The labour market situation recent in impact recent of third country migrants*". <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2295&langId=en>. Diakses 6 Juni 2018.

- ACRO Criminal Record Office. 2015. "Annual Report 2014-2015". [https://www.acro.police.uk/uploadedFiles/Annual%20Report%20A4%202014-15%20Final%20Version\(1\).pdf](https://www.acro.police.uk/uploadedFiles/Annual%20Report%20A4%202014-15%20Final%20Version(1).pdf). Diakses 25 April 2018.
- Andrew Green. 2012. "Comparison of UK Benefits with those of the EU14". <https://www.migrationwatchuk.org/briefing-paper/284>. Diakses 29 April 2018
- Andrew Green. 2014. "Many East Europeans Work Hard But How Many Pay Tax". <https://www.migrationwatchuk.org/briefing-paper/1.38>. Diakses 1 Mei 2018.
- Andrew Green. 2015. "The UK Labour Market – EU Workers by Occupation Skill Level". <https://www.migrationwatchuk.org/briefing-paper/364>. Diakses 18 Maret 2018.
- CESifo DICE (2006). "THE IMPACT EU ENLARGEMENT ON LABOUR MIGRATION IN FLOW IN OECD MIGRATION". <https://www.cesifo.de/ifoHome/facts/DICE/Migration/Migration/Labour-Migration/DR3-06-Imp-EU-Lab-Mig/fileBinary/DR3-06-Imp-EU-Lab-Mig.pdf>. Diakses 6 Juni 2018.
- Conor James Mckinney. 2016. "Explaining the EU deal: the 'emergency brake'". <https://fullfact.org/europe/explaining-eu-deal-emergency-brake/>. Diakses 14 Mei 2018.
- Conor James Mckinney. 2016. "Explaining the Eu deal : deporting eu immigrants". <https://fullfact.org/europe/explaining-eu-deal-deporting-eu-immigrants/>. Diakses 22 Mei 2018.
- Conor James Mckinney. 2016. "Explaining the Eu deal : exporting child benefit". <https://fullfact.org/europe/explaining-eu-deal-exporting-child-benefit/>. Diakses 22 Mei 2018.
- European Parliament. 2016. "Outcome of the European Council of 18-19 February". [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573303/EPRS_BRI\(2016\)573303_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573303/EPRS_BRI(2016)573303_EN.pdf). Diakses 5 Maret 2018.
- Jonathan Portes. 2014. "Immigration: Could we – should we – stop migrants coming to Britain ?". <https://www.theguardian.com/uk-news/2014/oct/19/immigration-policy-ukip-restrictions-european-union>. Diakses 17 Januari 2018.
- Kenneth Walsh. 2009. "The development of employment policy in the EU leading up to the European Employment Strategy 1997". <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12044&langId=en>. Diakses 23 Oktober 2018.
- Mark Chandler. 2016. "6+ Population totals & EUA2 - Office for National Statistics". <https://www.ons.gov.uk/file?uri=/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/adhocs/006712eua2eua8andeu14populationandemployment/countryofbirtheu14a216employmentpopulation20072016final.xls>. Diakses 26 Juni 2018.

Stephen Booth. 2016. "What are the legal implications of David Cameron's proposed reforms to EU migration?". <https://openeurope.org.uk/intelligence/immigration-and-justice/legal-implications-david-camerons-proposed-reforms-eu-migration/>. Diakses 1 Juni 2018.

The Rt Hon Iain Duncan Smith. 2015. "EU jobseekers barred from claiming Universal Credit". <https://www.gov.uk/government/news/eu-jobseekers-barred-from-claiming-universal-credit>. Diakses 20 Maret 2018.

Tim Ross, Political Correspondent. 2014. *Revealed: Home Office dossier on abuse and fraud by EU migrants*. <https://www.telegraph.co.uk/news/politics/conservative/10597409/Home-Office-hid-dossier-on-EU-migrants.html>. Diakses 4 April 2018.